

BAB III

PEMBAHASAN

1. Tata Cara Jama'ah Majelis Taklim Meningkatkan Partisipasi Politik di Desa Tanjung Agung Pada Pilpres 2019.

Tata cara merupakan rangkaian cara atau kinerja yang saling berkaitan dan membentuk rangka pelaksanaan dalam suatu kegiatan. Adapun tata cara yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah rangkaian cara untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Tanjung Agung.

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk menentukan suatu putusan yang berkaitan dengan politik.¹ Selain itu, Herbert Mc Closky, menyebutkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang dilakukan oleh masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya maupun kebijakan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung.² Dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memilih pemimpinnya dan menentukan kebijakan politik di negaranya.

¹Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik, PT. Grasindo, Jakarta.

²Subekti, T. (2014). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Journal of Governance and Policy*, 1(1).

Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang P.Huntington dan Joan M. Nelson menyebutkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat sebagai pribadi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam menentukan keputusan. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.³ Miriam Budiarmo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).⁴

Banyaknya pendapat para ahli yang mendeskripsikan tentang Partisipasi Politik maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Adapun tata cara yang dilakukan jama'ah Majelis Taklim Desa Tanjung Agung di antaranya:

1. Melakukan sosialisasi

³Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik, PT. Grasindo, Jakarta.

⁴. Subekti, T. (2014). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Journal of Governance and Policy*, 1(1).

Dalam sosialisasi masyarakat dapat memilih sesuai hati nurani agar pemilihan presiden berjalan dengan tertib dan aman. Majelis Taklim Desa Tanjung Agung melakukan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat setempat.

Hubungan pada sebuah Legitimasi Masyarakat dipengaruhi oleh demokrasi dan partisipasi masyarakat pada suatu pemerintahan. Misalnya dalam pemilu legitimasi masyarakat pada pasangan calon terpilih dipengaruhi oleh partisipasi politik. Masyarakat dalam menentukan pilihan mereka di saat pemilu memiliki kepentingan tersendiri. Masyarakat sebagai pemilih akan menentukan masa depan pejabat selama satu periode pemilihan.

2. Komunikasi yang baik

Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan dapat dipandang melalui partisipasi politik pada saat pemilu. Hal ini terdapat dalam wawancara pada anggota jamaah Majelis Ta'lim At-Takwa Tanjung Agung hasilnya sebagai berikut:

“penting untuk melakukan sebuah komunikasi baik terhadap masyarakat terutama pada saat ini di majelis taklim. Karena dengan komunikasi dan sosialisasi baik, dapat meningkatkan rasa partisipasi politik di dalam diri masyarakat tersebut secara tidak langsung.”⁵

Berdasarkan jawaban wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa komunikasi yang baik merupakan cara yang efektif digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Jama'ah Majelis

⁵Wawancara dengan Pendiri Majelis Ta'lim At-Taqwa Desa Tanjung Agung Hj.Ratati

Taklim At-Takwa Tanjung Agung sangatlah peduli dan mementingkan pemilihan umum, jama'ah Majelis Taklim juga selalu menjaga komunikasi dengan baik. Seseekali mereka menyelipkan obrolan mengenai pemilihan umum, hal ini membuat jama'ah lain yang tidak mengetahui dan tidak paham menjadi paham dan mengerti tentang pemilihan umum.

3. Mengajak untuk tidak golput

Hak politik warga negara juga sangat berkaitan dengan partisipasi politik. Bentuk pemenuhan hak politik adalah dengan keberadaan kebebasan berpendapat setiap warga negara. Seperti yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 28:

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Jama'ah Majelis Taklim At-Takwa setidaknya telah mengetahui fungsi dan cara menggunakan hak politik dengan baik dan benar, hal ini dikarenakan adanya timses yang datang ke Majelis Taklim untuk menginformasikan tata cara menggunakan hak politik dengan baik dan benar, selain itu juga para jama'ah mengetahui hak politik ini dari jama'ah yang lainnya.

Pilpres 2014 merupakan pilpres menarik, dimana pada tahun ini terjadi peningkatan sebesar 10%. Partisipasi politik di Desa Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Dua kandidat yang bersaing pada pilpres tersebut yang

pertama adalah Prabowo Subianto berpasangan Hatta Rajasa, yang kedua adalah Joko Widodo berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Beberapa Partai yang sudah merebut kursi legeslatif mengukung Pasangan capres – cawapres tersebut.. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa didukung lima partai politik, yakni:

Gerindra

1. PPP
2. PKS
3. PAN
4. Golkar
5. Partai Demokrat.

Keenam partai tersebut telah memenangkan lebih darisetengah kursi yang ada di parlemen, sebanyak 56,66%. Keenam partai ini menamkan koalisi yaitu koalisi merah putih. Keenam partai tersebut mendapatkan 35,3 kursi di DPR.

Pasangan kedua Joko Widodo dan Jusuf Kalla didukung oleh 4 partai, yakni:

1. PDI-P
2. PKB
3. NasDem
4. Hanura.

Keempat partai tersebut memenangkan 207 kursi parlemen (39,97%). Dan koalisi dinamakan koalisi Indonesia hebat. Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut di atas, hal ini tidak lepas dari kesadaran partisipasi masyarakat yang ada di Desa Tanjung Agung. Selanjutnya perincian rekapitulasi pemilu sebagai berikut, (perbandingan pemilu 2014 dan 2019):

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partisipasi Pemilih Pada Pilpres 2014 dan 2019 di Desa Tanjung Anom

No	Tahun	Jumlah Peserta Pilpres	Presentase Partisipasi Pemilih
1.	2014	1.796	71,17%
2.	2019	1.801	75,11%

Sumber : KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu

Bahwa perolehan suara berdasarkan tabel 3.1, 71,17% suara merupakan hasil dari partisipasi masyarakat Desa Tanjung Agung. Pada tahun 2019 memperoleh 75,11% suara. Dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat telah terjadi sebesar 3,94%.

Adanya negara demokrasi diwujudkan dengan adanya Partisipasi Politik Masyarakat. tanpa adanya partisipasi masyarakat negara cenderung akan otoriter dan represif. Hal ini kembali membangunkan ingatan lama tentang politik di masa orde baru yangmana adanya kesewenang-wenangan

pada para pejabat publik dalam mengambil keputusan. Akibatnya kebijakan public tersebut tidak serentak dapat diimplementasikan di masyarakat.

4. Menentukan pilihan calon pemimpin

Jama'ah Majelis Taklim At Takwa sangatlah teliti dalam menilai calon pemimpin. Jama'ah Majelis Taklim akan memilih dan mendukung calon pemimpin yang baik dan melaksanakan apa yang telah dijanjikan sewaktu kampanye. Baik tidaknya calon pemimpin dapat diketahui dari keseharian mereka. Jama'ah Majelis Taklim sangat tidak suka jika harus memilih karena suap, hal ini adalah perilaku yang sangat tidak baik untuk digunakan calon pemimpin, karena mereka calon pemimpin yang harus bersikap adil, jujur, serta tanggung jawab.

Partisipasi politik masyarakat pada pemilu menentukan arah serta kemajuan suatu bangsa. Penentuan Kualitas adanya partisipasi politik bahwasannya masyarakat yang menjadi daftar pemilih tetap dapat memberikan suaranya, sesuai keinginan setiap individu. Permasalahan pemilu bukan sebatas proses teknis, tetapi permasalahan utama yakni jauh dari yang diharapkan dari hasil pemilu. Terlahirnya pemimpin yang ideal dapat menjadi hasil dari pemilu. Namun, Kenyataannya bahwa selain kurang profesionalnya proses pelaksanaan, anggota legislatif terpilih melalui pemilu memiliki kualitas rendah, baik dari profesionalisme yang masih terbatas atau tidak memiliki skill. Salah satu jamaah majelis ta'lim At Takwa membenarkan hal tersebut.:

“iyaa pemilu disini ya begitu kalau tidak ada pasangan yang tidak sesuai dengan skillnya ya gak kami pilih. Saya dan ibu-ibu disini juga begitu memilih dengan hati nurani meskipun banyak paslon yang datang ke majelis taklim ini untuk menyampaikan ceramah yang berisi visi dan misi mereka.”⁶

Banyak hal yang pastinya digunakan oleh para timses dan para calon pemimpin untuk mempromosikan diri mereka dengan sebaik-baiknya agar dapat dipilih oleh masyarakat dan bisa diterima dimasyarakat. Akan tetapi berbeda dengan ibu-ibu jama'ah Majelis Taklim At-Takwa, mereka memilih pemimpin yang sesuai dan pantas untuk memimpin yakni dengan melihat masing-masing skill yang dimiliki para calon pemimpin, dan jika tidak sesuai dan tidak pantas untuk dipilih para jama'ah tidak akan memilih calon tersebut. Jama'ah Majelis Taklim memilih dan menggunakan hak pilih mereka dengan hati nurani dan bukan perintah ataupun suap.

2. Dampak Peningkatan Partisipasi Politik Pilpres 2019 Ibu – ibu Majelis Taklim At Takwa di Desa Tanjung Agung

Adapun dampak peningkatan yang terjadi atas partisipasi politik 2019 di antaranya:

1. Peningkatan suara yang diperoleh

Suara yang diperoleh pada pemilu menentukan calon yang menempati kursi pemerintahan. Supaya mendapatkan suara pemilu yang tinggi, maka perlu partisipasi yang tinggi pula. Partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019

⁶Wawancara dengan Reni Anita jamaah Majelis taklim At-takwa yang mengikuti Pemilu 2014 dan 2019

di Desa Tanjung Agung memperoleh 79% lebih. Menandakan bahwa partisipasi politik masyarakat sudah baik.

Tetapi dapat dilihat dari keputusan resminya dari KPU Kecamatan Batu Raja bahwa hal tersebut dapat dikarenakan murni partisipasi masyarakat yang sadar akan pentingnya suara rakyat, atau bisa juga karena menjadi tim sukses pada salah satu calon yang akan memimpin.

Majelis Taklim dapat dikatakan sebagai *Civil Society* paling awal dipahami sebagai sistem kenegaraan yang selalu di identifikasi dengan Negara. *Civil* paling dipahami sebagai sistem kenegaraan yang selalu di identikkan dengan Negara (*state*). Pemahaman ini dikembangkan oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 SM) yang menyebut *Civil Society* dengan istilah *Koinonie Politik*.⁷

Menurut Almond and Verba⁸ dalam Saiful Mujani, Warga Negara dikordinasikan untuk terlibat dan partisipasi politik yang merupakan aktifitas penting dalam demokrasi. *Civil Society* turut mendorong tumbuhnya kepentingan politik, pemberian dukungan politik pada partai politik tertentu (*partisanship*), diskusi politik, menjadi “*melek Politik*” dan untuk menumbuhkan efikasi politik yakni sikap positif bahwa dari seorang warga

⁷Karni, A. S. (1999). *Civil Society dan Ummah (Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi)*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu..

⁸Mujani, S. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia pasca Orde Baru (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)*.

penting dalam mempengaruhi proses politik dan percaya pada peran institusi dan pejabat publik.

Paradigma *Civil Society* ini memberi sumbangan pemikiran yang besar dalam perjalanan demokrasi serta menjadi sumber inspirasi bagi pemberdayaan rakyat di berbagai negara, khususnya di Indonesia, *Civil Society* di Indonesia sesuai dengan yang didefinisikan oleh Dawam Rahardjo,⁹ ialah proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya, dalam *Civil Society* masyarakat akan bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non negara.

Karakter utama dari *Civil Society* ialah keswadayaan dan kesukarelaan, artinya bahwa organisasi memiliki tujuan untuk menyalurkan kepentingan bersama, satu visi, serta gagasan dan tidak untuk kepentingan individu atau perorangan saja. *Civil Society* mampu melaksanakan kiprahnya sendiri dengan keterbukaan serta tanpa ada ketergantungan kepada negara.¹⁰ *Majelis Taklim* sebagai objek dalam penelitian ini, dapat dikatakan sebagai *Civil Society*, karena Majelis Taklim mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas, turut membantu perilaku masyarakat.

Majelis Taklim dalam konteks partisipasi politik, dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan (mencoblos calon pemimpin).

⁹Surbakti,R.(1992). *Memahami ilmu politik*.Grasindo. (Jakarta:Grasindo,2010),hlm.179-180

¹⁰Muhammad AS Hikam. (2000). *Islam, demokratisasi, dan pemberdayaan civil society*. Erlangga.

Narasumber menyatakan ikut berpartisipasi dalam Pemilu Presiden 2014. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa partisipasi narasumber baik, yang mana narasumber berjumlah 9 orang dan mengatakan ikut berpartisipasi dalam kisaran angka 100%. Hal ini terjadi karena seringnya mengikuti kajian, dimana para ustadz atau ustadzah menghimbau pentingnya berperan serta dalam partisipasi politik.

2. Sadar akan pentingnya menggunakan hak suara

Dampak yang dirasakan majelis taklim ketika para partisipasi politik ikut serta dalam menyuarkan pemilu yaitu anggota majelis taklim dapat mengerti betapa pentingnya partisipasi masyarakat, agar masyarakat tidak golput. Serta mengetahui pemimpin yang baik untuk 5 tahun kedepan, karena juga disunnahkan untuk shalat istikharah sebelum menentukan calon pemimpin kedepannya. Hubungannya dengan pemilu yaitu saat mereka sadar secara rasional akan pentingnya penentuan pemimpin untuk memimpin selama periode yang cukup lama.

3. Majelis Taklim menjadi wadah aspirasi

Unsur demokrasi yang mendasar salah satunya adalah keterlibatan Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim juga dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat untuk menyuarkan pendapatnya. Tidak hanya itu, Majelis Taklim juga dapat menjadi tempat untuk para pasangan calon untuk mempromosikan dirinya agar dipilih. Tentunya semua ini harus tetap dilaksanakan dengan tertib dan menghindari kerusuhan. Maka, sebagai sarana pelaksanaan demokrasi

penyelenggaraan pemilu keterlibatan masyarakat tidak boleh lepas. Mengingatkan jamaah Majelis ta'lim untuk tidak golput juga penting selain sosialisasi. Hal seperti ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya oleh pemerintah.

Dengan begitu, maka dari penelitian ini berhasil menunjukkan terdapat peranan Majelis Ta'lim pada partisipasi pilpres 2014. Netralistas dalam hal ini ditunjukkan oleh Majelis Ta'lim Attaqwa. Unsur mobilisasi dari salah satu partai politik terkaitpun tidak ada.